



Ketidaksetaraan Gender Perempuan Mesir di Bidang Politik Pasca Arab Spring 2011

Maryam Jamilah

Sekolah Kajian Strategik dan Global

Abstract

This article attempts to analyze roots political gender inequality issue in Egypt post Arab Spring 2011. Egyptian women participated and involved to oppose Mubarak regime in Arab Spring movement 2011, their existence at demonstration indicated recognition and improvement of their position in public sphere. Those participations gave hopes and opportunities for women to change women position on Egypt society. However, after overthrowing of Mubarak regime those hopes are remaining unrealizable. Women representation in Egypt parliament is less than before (less than 2%). This phenomenon is analyzed by using qualitative method with descriptive analysis approach. The research question is answered by operating root of gender inequality in developing country theory. Result of this research is there are three factors that constraint gender equality especially in political aspect in Egypt, which are economic (physical based production, intense household duty), cultural (patriolocality and son future potential support to elder) and political regime shift (from military to Ikhwanul Muslimin regime).

Abstrak

Salah satu jenis psikopatologi perkembangan yang sering terjadi pada masa kanak-kanak yaitu sindrom tourette yang diawali dengan gejala ringan seperti gerakan tik ringan pada wajah, kepala atau tangan. Tik sering muncul jika anak merasa tertekan (stres) dan adanya ketidakstabilan emosi. Hal itu semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia seseorang yang mencakup beberapa bagian tubuh lain seperti kaki dan anggota tubuh yang lain. Sindrom tourette dapat terjadi pada setiap orang dari semua kelompok etnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peran penerimaan sosial terhadap psikopatologi perkembangan sindrom Tourette pada anak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan secara sosial (lingkungan) sangat membantu seseorang dalam beradaptasi dengan baik dan dapat menggunakan potensinya secara maksimal terutama bagi orang yang mengalami penyimpangan perkembangan salah satunya adalah sindrom tourette.

Keywords: gender inequality, Egyptian women, politic, Arab Spring.

DOI: 10.22515/bg.v2i2.1099

Coressponding author

Email: maryamjamilahmj73@gmail.com

Pendahuluan

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan di dunia dengan tingkat kesetaraan gender terendah, berdasarkan data dari World Economic Forum mengenai laporan *Global Gender Gap Index 2015* secara keseluruhan tingkat *gender gap* di Timur Tengah berada pada angka 59% dimana 100% merepresentasikan tingkat kesetaraan total (Bechouche, 2013). Salah satu negara Timur Tengah dengan tingkat kesetaraan perempuan yang rendah adalah Mesir. Negara Mesir berada di posisi 136 dari total 145 negara, ranking 135 dalam gender gap di bidang partisipasi dan kesempatan ekonomi, serta posisi 115 di bidang kesetaraan pendidikan dan dalam hal pemberdayaan politik perempuan Mesir berada di posisi 136 (weforum.org, 2015). Salah satu penyebab rendahnya tingkat kesetaraan gender di Timur Tengah adalah adanya persepsi yang menganggap bahwa perempuan berada di kelas kedua, didukung oleh seluruh sistem sosial dan kebudayaan yang menentang adanya emansipasi perempuan dan kesetaraan gender (Knidiri, 2009, p.29).

Fenomena Arab Spring pada tahun 2011 menjadi peristiwa penting penanda partisipasi perempuan Timur Tengah terutama Mesir di ruang publik. Pada momen tersebut laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam perlawanan terhadap rezim yang berkuasa. Bahkan di Mesir seorang aktivis bernama Asmaa Mahfouz menyatakan bahwa *“All of us were there throwing stones, moving dead bodies...there was no difference between men and women.”* (Economic.com, 2011). Peran perempuan yang signifikan dalam gerakan Arab Spring ini juga terbukti melalui pernyataan seorang *blogger* Mesir Eman Hashim yang menyatakan *“I remember all the old women who came to us with food and drinks in Tahrir Square ... When it became so bloody that it was really hard for women to be in the front row, men knew that women were waiting meters away, with medicine, water, and words of support”* (Hashim, 2012). Kontribusi perempuan dalam gerakan Arab Spring kemudian mampu menggulingkan rezim Hosni Mubarak di Mesir setelah memimpin 30 tahun lamanya.

Diakuinya partisipasi perempuan Mesir di ranah publik pada saat Arab Spring seperti yang dijabarkan sebelumnya ternyata tidak berlangsung seperti yang diharapkan, perjuangan serta pengorbanan yang dilakukan oleh perempuan di masa Arab Spring ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini terbukti dengan perwakilan perempuan di Mesir pasca Arab Spring yang justru mengalami penurunan luar biasa dibandingkan dengan masa pemerintah Hosni Mubarak. Hasil dari pemilu di Mesir menunjukkan bahwa hanya 9 dari 508 anggota perlemen adalah perempuan (kurang dari 2%, sedangkan pada masa Mubarak perwakilan perempuan di parlemen mencapai 12%) (Hareetz, 2012). Meskipun di bawah rezim Mubarak pembagian perempuan di parlemen sebanyak 64 orang diisi oleh perempuan-perempuan yang berasal dari partai-partai yang berkuasa, namun hal tersebut tentu lebih baik dibandingkan sembilan perwakilan perempuan di parlemen (Hareetz, 2012).

Tidak berhasilnya upaya perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender di negara Timur Tengah terutama di Mesir menjadi hal yang patut untuk dianalisis, untuk mengetahui faktor penghambat terjadinya perubahan tersebut dan bagaimana potensi terwujudnya kesetaraan gender di Mesir. Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini, yaitu mencari indikator yang menjadi akar ketidaksetaraan gender bidang politik di Mesir. Adapun untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan di atas, peneliti menggunakan kerangka teori *Root of gender inequality* (penyebab ketidaksetaraan gender).

Ada dua asumsi penyebab ketidaksetaraan gender menurut Seema Jayachandran dalam tulisannya yang berjudul *The Roots of Gender Inequality in Developing Countries*, yaitu faktor ekonomi dan budaya (Jayachandran, 2014, PP.1-20). Adapun indikator untuk mengukur hubungan antara perekonomian dengan kesetaraan gender adalah sebagai berikut. a) Sistem produksi berbasis kekuatan fisik Saat perekonomian suatu negara maju, maka ada pergeseran sektor perekonomian dari yang awalnya fokus pada sektor agrikultur dan manufaktur berubah menjadi ekonomi yang berorientasi pada sektor jasa. Transisi sektor ini justru berdampak baik bagi perempuan di negara tersebut karena sektor manufaktur dan agrikultur keduanya membutuhkan kekuatan fisik dalam proses produksi, lain halnya dengan sektor jasa. Begitu juga sebaliknya jika perekonomian suatu negara masih dalam proses pengembangan maka sektor perekonomian yang memainkan peranan adalah agrikultur dan manufaktur dimana peran perempuan tidak terlalu signifikan dalam dua sektor tersebut. b) Pekerjaan rumahan yang intens. Pembangunan ekonomi dicirikan dengan infrastruktur fisik yang lebih baik, teknologi yang lebih canggih dan pendapatan domestik yang lebih tinggi. Hal ini berdampak positif bagi pekerjaan rumah yang dilakukan perempuan, yang biasanya harus mengumpulkan kayu untuk memasak di tungku kayu sekarang bisa menggunakan kompor listrik dan tidak menghabiskan banyak waktu. Inovasi-inovasi seperti ini bisa mengurangi beban pekerjaan perempuan dan memberikan waktu tambahan bagi perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik.

Faktor-faktor kebudayaan yang menyebabkan ketidaksetaraan gender (faktor kebudayaan). Faktor tersebut terbagi menjadi dua yaitu a) *Patrilocality*. *Patrilocality* merupakan salah satu praktek kebudayaan dimana pasangan yang telah menikah hidup di dekat atau bersama orang tua dari suami. Ketika perempuan menikah secara esensial dia berhenti menjadi anggota keluarga dari keluarga kandungnya dan bergabung dengan keluarga suami. Dibawah sistem seperti ini, orang tua akan lebih melakukan investasi pada anak laki-laki ketimbang perempuan baik itu dari segi pendidikan maupun kesehatan, karena anak laki-laki akan tetap tinggal sedangkan anak perempuan akan menjadi anggota keluarga suaminya pada suatu hari nanti. b) Dukungan hari tua dari anak laki-laki. Masih berhubungan dengan konsep *patrilocality* diatas yaitu fakta bahwa anak laki-laki secara tradisional memberikan dukungan dan bantuan hari tua pada orang tua mereka dalam masyarakat, hal ini berlaku di

beberapa negara seperti China dan India. Hal ini menjadi faktor pendukung nilai lebih yang dirasakan oleh orang tua ketika mereka memiliki anak laki-laki daripada perempuan.

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggali makna atau *meaning* dari suatu fenomena. Pemilihan metode kualitatif disebabkan karena tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis penyebab dari ketidaksetaraan gender yang terjadi pada perempuan Mesir pasca Arab Spring. Selain itu dalam peneliti ini juga menggunakan metode analisa data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap (Miles & Huberman, 1994, P.18). (Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Keterlibatan Perempuan Mesir dalam Arab Spring

Asmaa Mahfouz seorang blogger yang berusia 26 tahun memposting sebuah video Pada 18 Januari 2011 di Facebook yang mengajak untuk melakukan demonstrasi di Tahrir Square untuk melakukan protes terhadap rezim Mubarak. *“If we have honour and want to live in dignity in this country, we must all go down to Tahrir Square on 25 January... We must demand our fundamental human rights as human beings... I will go to Tahrir Square. I will say no to corruption! I will say no to this system!”* (Asmaa Mahfouz, video blog 18 Januari 2011).

Dalam protes untuk menggulingkan Presiden Mubarak pada 11 Februari 2011, perempuan Mesir berpartisipasi sama halnya dengan laki-laki Mesir, menuntut agar rezim Mubarak segera berakhir dan terwujudnya pemerintahan sipil (Fidh, 2012, p.17). Berikut adalah pernyataan dari Amal Abdel Hadi dalam wawancara dengan Fidh yang menyatakan bahwa *“Women all ages and all walks of life were involved in every aspect of this revolution: in confrontations on the front line with security forces, organizing, writing, slogans, shouting and sleeping in Tahrir Square. Housewives came to protest with their children. Activists from all political movements participated in demonstration. Women and men were comrades in the protests. Women were not afraid. We witnessed no instances of sexual harassment. There was a sense of complete respect, support and solidarity towards women.”* (Hadi, 2011).

Dari pernyataan diatas dapat dilihat adanya optimisme dari perempuan Mesir tentang pengakuan partisipasi dan eksistensi mereka di ranah publik serta tercapainya kesetaraan gender di Mesir. Perjuangan yang dilakukan oleh perempuan Mesir saat momen Arab Spring diharapkan mampu meraih dukungan dari masyarakat sipil Mesir bagi perubahan kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat.

Selain ikut serta dalam demonstrasi dan menyuarakan protes secara langsung ataupun melalui media sosial, perempuan Mesir juga berkontribusi dalam menyediakan logistik untuk para demonstran, fenomena ini kemudian dimuat menjadi *headline* di Al Jazeera yang berjudul *“Women of the revolution”*. Aktivist Mesir yang bernama Gigi Ibrahim

mendeskrripsikan peran perempuan Mesir dalam menjaga keamanan para protestan dari interaksi dengan para pendukung Mubarak yang berusaha untuk menyerang para protestan. Pada malam tanggal 2 Februari Ibrahim menyatakan bahwa perempuan Mesir berada di garis depan dan memperingatkan para demonstran yang lainnya jika ada bahaya yang mendekat disamping itu perempuan juga mempersiapkan klinik sementara (Naib, 2011). Disamping itu penuturan dari Salma El Tarzi seorang pembuat film dan juga ikut serta dalam aksi protes di Tahrir Square, dia menyatakan bahwa *“When the man saw that women were fighting in front line that change their perception on us and we were all united. We were all Egyptians now.”* (Naib, 2011).

Hasil survey Gallup menunjukkan bahwa 30% dari demonstran yang melakukan protes dalam gerakan revolusi Arab Spring Mesir adalah perempuan (Gallup, 2012). Meskipun persentasinya tidak sebesar laki-laki, namun perempuan Mesir memainkan peranan yang signifikan dalam gerakan tersebut, terbukti melalui pernyataan dari Isobel Coleman, anggota konsil hubungan luar negeri yang mengklaim bahwa partisipasi perempuan pada tahap awal gerakan ini memberikan legitimasi dan perhatian yang luar biasa bagi gerakan yang pro Mubarak (Coleman, 2012).

Semua perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh perempuan Mesir dalam Arab Spring bukan hanya semata perlawanan terhadap rezim Hosni Mubarak, namun dibalik itu perempuan berusaha membuktikan keberadaan dan kekuatan mereka terhadap kaum laki-laki di Mesir. Melalui pembuktian tersebut ada harapan dari perempuan-perempuan Mesir bahwa momen Arab Spring menjadi momen perubahan bagi posisi dan kedudukan mereka dalam masyarakat Mesir baik dari segi politik sosial dan budaya.

Kondisi Perempuan pasca Arab Spring

Saat Mesir memulai masa transisi pasca digulingkannya rezim Mubarak, perempuan Mesir berjuang untuk mendapatkan posisi mereka dalam proses politik. Tidak lama setelah berhentinya Presiden Mubarak SCAF (Supreme Council of The Armed Forces) mengumumkan formasi komite yang bertugas melakukan perubahan konstitusi untuk mengajukan amandemen, komite tersebut terdiri dari 8 orang laki-laki (Fidh, p.19).

Keputusan yang diumumkan oleh SAFC tersebut kemudian menimbulkan respon dari perempuan Mesir. Pada 8 Maret 2011 perempuan berkumpul di Tahrir Square untuk memperingati hari perempuan internasional dan menunjukkan protes mereka terhadap tidak adanya perwakilan perempuan dalam komite perubahan konstitusi Mesir dan dalam proses pengambilan kebijakan politik pada masa transisi Mesir (Fidh, p.19).

Namun upaya protes dari perempuan Mesir tersebut berujung pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh kaum pria terhadap para demonstran perempuan. Seorang lelaki yang

marah kemudian memukuli para demonstran dan meneriaki mereka dengan menyatakan bahwa hak-hak perempuan yang mereka tuntut berlawanan dengan nilai dan ajaran dalam agama Islam. Diwaktu yang sama militer Mesir menggiring para demonstran perempuan dan melakukan diskriminasi dengan mengadakan tes keperawanan (Coleman, 2011). Bukan hanya itu kemudian mereka secara brutal dipukuli pada bulan Desember 2011 oleh anggota militer Mesir, yang kemudian peristiwa ini menimbulkan reaksi keras dari perempuan Mesir (Fahim, 2012).

Tidak hanya kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh perempuan Mesir dalam proses menuntut kesetaraan gender, namun mereka juga mengalami nasib yang buruk dalam hal representasi politik dalam parlemen Mesir pasca Mubarak. Dibawah rezim Mubarak, pada tahun 2009 sebuah produk hukum mengenai 64 kursi yang disediakan untuk perempuan di parlemen disahkan. Pada pemilu tahun 2010, 380 perempuan Mesir ikut serta dalam kompetisi politik dan kemudian 62 diantaranya terpilih menjadi anggota parlemen dan dilantik oleh presiden, dengan total presentasi perempuan di parlemen sebanyak 12% dari 518 kursi. Namun pasca Arab Spring, pada bulan Mei 2011 SCAF memutuskan untuk menghapus kuota 64 kursi untuk perempuan yang telah disetujui oleh Presiden Mubarak. Meskipun ada beberapa kandidat perempuan yang masuk dalam nominasi, mereka pada umumnya berada di daftar nama bagian bawah, hasil dari pemilihan tersebut perempuan hanya berhasil memenangkan 9 kursi dari 508 kursi parlemen Mesir (2%) (Fidh, p.20).

Berikut adalah penuturan dari Dr. Hoda Elsadda yang merupakan anggota dari *Women and Memory Forum (WMF)* dalam wawancaranya dengan FIDH, “*Political groups do not make women’s right a priority. This includes liberal and Islamist parties. None of political parties challenged the fact that no quota was imposed for women. Women’s right were compromised by all political groups.*” (Elsadda, 2012). Partisipasi politik yang lebih representative justru tidak berhasil diperoleh oleh perempuan Mesir pasca perjuangan mereka dalam gerakan Arab Spring.

Diskriminasi kemudian juga dialami oleh perempuan Mesir dalam konteks hukum. Beberapa reformasi legislatif yang berhasil lolos dari tahun 2000 hingga tahun 2009 telah meningkatkan perlindungan bagi beberapa hak perempuan. Pada tahun 2008 pemerintah mengadopsi hukum baru mengenai anak-anak (No 126) yang berisi tentang aturan legal usia pernikahan dari 16 hingga 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, reformasi lainnya berhubungan dengan masalah perceraian dan hak asuh anak. Beberapa dari reformasi ini ditentang oleh kelompok oposisi baik itu sekuler maupun islamis.

Perwakilan dari Ikhwanul Muslimin telah lama mengkritik adanya hukum mengenai hak perempuan dan anak ini. pasca berhentinya Presiden Mubarak kelompok Salafi kemudian meminta adanya reformasi undang-undang tersebut, karena dianggap tidak sah dan tidak

sesuai dengan Syariat. Pada Juli 2011 Ketua dari Pengadilan Agama mengumpulkan draf yang berisi penghapusan prosedur *khula* dalam perceraian dan mengembalikan praktek-praktek yang mengizinkan suami untuk mengembalikan istri yang “tidak patuh” secara paksa ke rumah keluarganya (Fidh, p.22).

Bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi pasca revolusi Arab Spring, baik itu dalam konteks politik maupun hukum menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat perubahan-perubahan sosial yang mengarah pada kesetaraan gender di Mesir. Upaya perlawanan dan perjuangan perempuan Mesir dalam revolusi seolah dilupakan oleh masyarakat Mesir pada umumnya dan elit maskulin yang menjabat pada khususnya.

Faktor penyebab ketidaksetaraan gender di Mesir

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa faktor penyebab ketidaksetaraan gender di Mesir, yaitu 1) Keadaan ekonomi Mesir Pasca Arab Spring. Keadaan ekonomi di Mesir pasca Arab Spring dipengaruhi beberapa hal yaitu, a) Sistem produksi berbasis kekuatan fisik di Mesir. Berikut adalah data mengenai beberapa sektor penting dalam perekonomian Mesir yang memberikan kontribusi yang besar bagi GDP Mesir dari tahun 2011-2012.

Gambar 3.1 Sektor Perekonomian Mesir dan Kontribusinya terhadap PDB 2011-2012



Sumber: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Cairo, *Potensi Pasar Bisnis di Mesir*, hal: 3

Data diatas menunjukkan bahwa ada tiga sektor utama yang paling besar pengaruhnya bagi perekonomian Mesir yaitu sektor pertambangan, industri manufaktur dan pertanian. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor perekonomian yang membutuhkan tenaga kerja dengan kapasitas dan kemampuan fisik yang kuat, dengan demikian tentu saja akan didominasi oleh laki-laki. Sedangkan perempuan yang secara fisik tidak bisa ditandingkan dengan kekuatan laki-laki tidak memiliki kontribusi yang besar dalam pasar tenaga kerja di sektor-sektor penting tersebut.

Sektor jasa yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi di Mesir salah satunya adalah sektor pariwisata. Namun pasca revolusi Arab spring pendapatan pariwisata Mesir mengalami penurunan secara drastis yaitu sebesar 29.8% yang pada tahun 2010 menghasilkan pendapatan sebanyak 12.5 juta USD kemudian pada tahun 2011 menjadi 8.8 juta USD. Berikut adalah data yang menunjukkan penurunan pendapatan sektor pariwisata dari negara Mesir pasca terjadinya Arab Spring pada tahun 2011.

Tabel 3.1
Pendapatan Sektor Pariwisata (Persen) Pasca Arab Spring

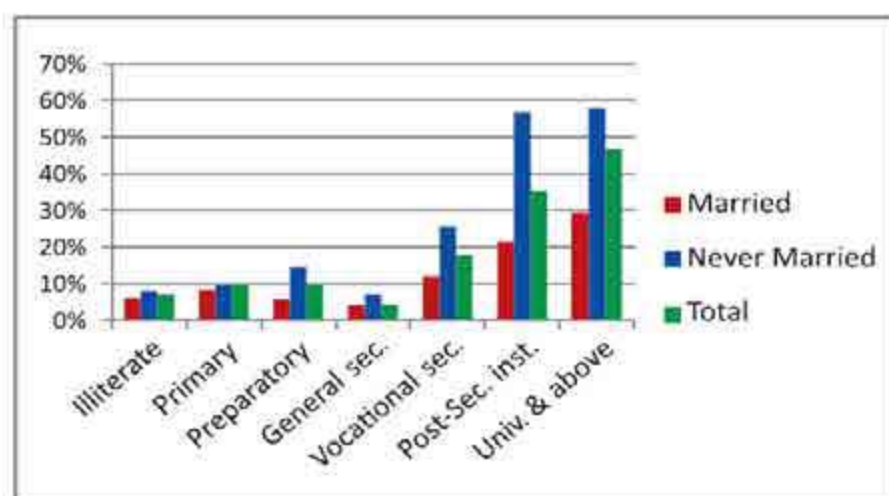
	2000	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Egypt	6.8	27.0	17.2	-2.9	16.0	-31.5	-
Lebanon	10.3	6.2	9.0	13.3	14.3	-13.6	-
Libya	115.4	-59.4	0.0	60.6	6.9	-	-
Tunisia	-6.7	12.5	15.9	-9.8	-1.4	-27.3	-
Syria	4.9	40.7	6.9	19.0	66.8	Non-available	

Sumber: Worldbank, Pendapatan Pariwisata Internasional (2013)

Hal ini menyebabkan semakin terpinggirkannya peran perempuan dalam sektor ekonomi di Mesir pasca peristiwa Arab Spring. Saat keadaan ekonomi Mesir semakin memburuk akibat Arab Spring maka dampak yang dirasakan oleh perempuan Mesir jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak yang dirasakan laki-laki. Dengan semakin terbatasnya lowongan pekerjaan di sektor jasa terutama pariwisata bagi perempuan maka keadaan ekonomi mereka semakin terpuruk. Ditambah lagi beban mereka sebagai seorang ibu yang harus mengurus kebutuhan sehari-hari dari anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa Arab Spring mempersulit kondisi perekonomian Mesir dan juga secara tidak langsung memperburuk penderitaan yang dialami oleh perempuan Mesir.

Selanjutnya disebabkan karena b) tugas rumah perempuan yang berat. Berikut adalah presentase perempuan Mesir berdasarkan status pendidikan dan status pernikahan.

Tabel 3.1 Labor Force Participation Rate (Perempuan Mesir berusia 15-29 tahun berdasarkan status pendidikan dan status pernikahan



Sumber: Survey of Young People on Egypt Policy Brief Series, *Female Disadvantage in The Egyptian Labor Market: A Youth Perspective*, p. 3

Berdasarkan Labor Force Participation (LFP) Mesir, 66% perempuan muda Mesir yang tidak berpartisipasi dalam *labor market* mengatakan bahwa faktor penghambat utama adalah karena mereka juga merupakan ibu rumah tangga. Disamping itu fakta lainnya menunjukkan bahwa 87% perempuan muda dengan tingkat pendidikan sarjana tidak menjadi tenaga kerja di Mesir juga disebabkan oleh permasalahan tugas-tugas rumah tangga yang mesti dilakukan perempuan karena perannya sebagai istri dalam keluarga.

Seorang perempuan Mesir yang namanya muncul dalam *The New York Times* 13 Juni 2010 yaitu Hoda Gamel, berusia 22 tahun yang menceritakan kesehariannya. Dia menyatakan bahwa dia bangun tiap hari pukul 7 pagi kemudian menyiapkan sarapan untuk dua saudara laki-laknya dan mengantarkan mereka ke sekolah, pulang ke rumah lalu menyetrika pakaian semua anggota keluarga dan pergi kerja yaitu menjual jilbab di sebuah mall. Pada malam harinya setelah melalui arus macet lalu lintas Kairo selama 90 menit dia kemudian sampai di rumah larut malam, makan malam, belajar dan akhirnya tidur esok paginya dia harus melakukan rutinitas yang sama (El-naggar, 2010).

Kesimpulan yang diambil dari kisah Hoda Gamel diatas adalah meskipun perempuan memutuskan untuk bekerja dan tetap melakukan tugas rumah, mereka akan mengalami beban yang lebih berat dibanding yang dirasakan oleh laki-laki. Dengan keadaan ekonomi yang cukup, uang yang harus dikeluarkan untuk membiayai pekerja rumah tangga tidak sanggup dipenuhi oleh keluarga di Mesir sehingga kemudian konsekuensinya adalah perempuan tinggal di rumah dan menjalankan tugas rumah tangga atau berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir dengan beban dan rutinitas yang lebih berat dibanding laki-laki. 2) Faktor budaya yang menyebabkan ketidak setaraan gender. Yang menjadi faktor budaya yang menyebabkan ketidaksetaraan gender adalah a) Patrilocalitas. Pernikahan di

Mesir secara tradisional bersifat patrilokalitas, berdasarkan *Survey of Young People in Egypt 2011*, 40% dari laki-laki muda yang telah menikah dan 36% dari perempuan muda yang telah menikah dilaporkan hidup bersama dengan keluarga suami semenjak menikah. Hanya sedikit dari mereka yang menikah dan hidup bersama dengan keluarga istri (sekitar 0.8% perempuan dan 1.4% laki-laki) atau hidup dengan orang lain (Opcit, 2011).

Disamping itu pemuda dan pemudi Mesir yang belum menikah ketika ditanya apakah mereka ingin hidup bersama keluarga mertua pasca menikah menunjukkan hasil bahwa 45% dari perempuan muda yang belum menikah menjawab mereka ingin tinggal bersama keluarga suami mereka (Opcit, 2011). Hal ini mengindikasikan pemahaman dan nilai-nilai patrilokal masih sangat kuat dianut oleh masyarakat Mesir hingga tahun 2011. Hasil survey ini mengindikasikan bahwa karakteristik pernikahan dalam masyarakat Mesir masih menganut paham bahwa setelah menikah anak perempuan akan menjadi bagian dari keluarga suami.

Nilai-nilai patrilokal ini yang kemudian menyebabkan posisi dan kedudukan perempuan dalam keluarganya sendiri menjadi tidak terlalu penting karena pada suatu hari akan meninggalkan keluarga intinya. Sehingga orang tua lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya kepada masa depan anak laki-laki ketimbang anak perempuan.

Data dari pemerintahan Mesir menunjukkan bahwa 82% dari total semua golongan muda Mesir yang tidak pernah mengecap bangku pendidikan adalah perempuan (IDSC, 2010, p.11). Sebanyak 13% dari semua total perempuan muda di Mesir tidak pernah bersekolah sedangkan jika dibandingkan dengan laki-laki yang tidak bersekolah hanya mencapai angka 3% (IDSC, 2010, p.11). Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa investasi orang tua ke pendidikan lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki ketimbang anak perempuan di Mesir. b) Dukungan hari tua dari anak laki-laki. Menurut Kandiyoti masyarakat Muslim di Timur Tengah memiliki karakter adanya nilai-nilai patriarki klasik (Kandiyoti, 1988, p.290). Di Mesir hubungan dalam keluarga besar telah berevolusi dengan adanya kontrak keluarga patriarki (*patriarchal kin contract*) (Joseph, 1993, p.484). Anak-anak di Mesir pada umumnya tetap tinggal di rumah orang tua mereka hingga mereka menikah, dalam hal ini ketika anak perempuan telah menikah, kewajibannya sebagai anak kemudian beralih menjadi kewajiban kepada keluarga suami mereka. Hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai patrilokalitas yang telah dijelaskan sebelumnya.

Anak laki-laki masih akan tetap berada di keluarga biologis intinya, hal ini kemudian menimbulkan pandangan bahwa anak laki-laki merupakan bentuk jaminan hari tua yang lebih bisa diandalkan dibanding anak perempuan. Pandangan ini kemudian berdampak pada lebih terakomodirnya masa depan laki-laki di keluarga Mesir dibanding perempuan, karena orang tua memikirkan kelangsungan hidupnya saat tua nanti. Disamping itu peran laki-laki dalam keluarga di Mesir telah diyakini sebagai penyedia kesejahteraan ekonomi,

sedangkan perempuan berperan dalam hal mengurus pekerjaan domestik di rumah (Jowkar dkk, 1986, p.65).

Dua faktor yang dijelaskan di atas merupakan faktor penyebab secara umum ketidaksetaraan gender di Mesir, namun untuk konteks ketidaksetaraan gender terutama politik pasca Arab Spring sektor perekonomian lebih relevan dengan fenomena ini. Hal ini karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pasca Arab Spring perekonomian Mesir memburuk dan juga berdampak negatif bagi kondisi perempuan dalam sektor ekonomi. Sedangkan untuk faktor kebudayaan (patrilokalitas dan pentingnya posisi anak laki-laki dalam keluarga) tidak mengalami perubahan yang signifikan akibat dari fenomena Arab Spring di Mesir pada tahun 2010.

Ketimpangan gender di bidang politik di Mesir sedikit banyaknya memang dipengaruhi oleh kedua faktor yang telah dijabarkan sebelumnya (ekonomi dan budaya). Namun faktor penentu lainnya yang peneliti temukan adalah kekuasaan atau rezim politik yang tengah berkuasa. Arab Spring yang terjadi di Mesir secara masif berusaha untuk merevolusi pemerintah militer yang diktator dari Hosni Mubarak menjadi pemerintahan yang lebih transparan, maka perubahan signifikan yang terjadi dalam masyarakat Mesir pasca Arab Spring adalah perubahan kehidupan politik.

Faktor ketidaksetaraan gender di Mesir selanjutnya adalah 3) Faktor Politik yang menyebabkan ketidaksetaraan gender di Mesir. Pasca revolusi Arab Spring dan pemilihan presiden pada tahun 2012, Presiden terpilih Muhammad Morsi memberikan janji-janji menyangkut peningkatan hak-hak perempuan, namun yang terjadi justru sebaliknya (Khafagy, 2013, p.8). Berikut adalah beberapa pandangan Partai Kebebasan dan Keadilan (PKK) Mesir yang merupakan partai dari Ikhwanul Muslimin menyangkut posisi perempuan Mesir dalam Politik (Dyer, 2013, pp.11-12). a) PKK menganggap peran perempuan dalam revolusi 2011 hanyalah semata-mata bentuk dukungan yang dilakukan oleh perempuan untuk membantu aksi revolusi laki-laki, dan bukanlah dianggap sebagai tindakan politik perempuan dengan agenda tersendiri untuk kepentingan kaum perempuan. b) Selama masa pemerintahan Mursi, PKK menyalahkan para demonstran perempuan anti-Mursi karena dianggap mengekspos diri mereka dan mengundang para laki-laki untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mereka. c) Presiden Mursi dengan jelas mengucilkan perempuan-perempuan dari posisi-posisi tinggi dalam partai PKK. Perempuan hanya diberikan peran-peran pendukung dan administratif dan bukanlah posisi yang berpengaruh dan berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. d) PKK menolak untuk mengimplementasikan kuota bagi perwakilan perempuan di pemerintahan Mesir, padahal hal tersebut merupakan salah satu tuntutan penting dari kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan menurunnya persentase jumlah perempuan di parlemen Mesir pasca Arab Spring.

Selain hal tersebut, hubungan antara kekuasaan Partai Keadilan dan Kebebasan (PKK) Mesir dengan ketidak setaraan gender di Mesir dapat dilihat dari fenomena peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang melakukan protes dan terlibat dalam demonstrasi di masa pemerintahan Morsi di banding sebelumnya. Data dari *United Nation Entity of Gender Equality and Empowernment of Women* menunjukkan bahwa 99.3% perempuan di Mesir pernah mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual. 96.5% dari perempuan melaporkan bahwa telah mengalami pelecehan seksual seperti *touching* yang menjadi pelecehan seksual paling sering terjadi (UN.org).

Alasan mengapa rezim Morsi (Ikhwanul Muslimin) bertanggung jawab atas memburuknya kondisi perempuan dalam masyarakat yaitu karena dua hal: yang pertama rezim ini menciptakan budaya menyalahkan perempuan atas kasus pelecehan seksual yang dialami, dan yang kedua yaitu rezim ini juga membantu menciptakan lingkungan dimana membicarakan pelecehan seksual merupakan sebuah aib yang harus ditutupi (E.Dyer, pp.30-32).

Perwakilan dari PKK dan Ikhwanul Muslimin secara berulang kali menyalahkan para korban-korban dari kasus pelecehan seksual. Salah satu buktinya yaitu melalui pernyataan dari Reda El-Hefnawy mantan dari perwakilan PKK di Dewan Hak Asasi Manusia PBB memberikan jawaban menyangkut siapa yang bertanggung jawab atas fenomena peningkatan tingkat pelecehan seksual tersebut dengan menyatakan bahwa: “ *Women should not mingle with men during protest...How can the Ministry of Interior be tasked with protecting a lady who stand among group of men?*” (Taha R.M, 2013).

Menurut pandangan pemerintahan Mursi yang menjadi penyebab di balik maraknya pelecehan seksual terhadap perempuan adalah keberadaan perempuan dalam aksi protes di publik dan juga cara perempuan dalam menampilkan diri mereka secara fisik yang dianggap sebagai undangan bagi terjadinya pelecehan seksual (E.Dyer, 2013). Namun fakta yang ditemukan di lapangan berbeda dengan tuduhan pemerintah tersebut. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Egyptian Center for Women's Right (ECWR)*, jumlah korban pelecehan seksual yang menggunakan hijab ataupun niqab adalah 72% dan merupakan persentase yang hampir sama dengan total jumlah perempuan yang menggunakan hijab atau niqab di masyarakat Mesir (unfpa.org, 2010). Fakta lain yang bertentangan dengan tuduhan tersebut adalah berdasarkan wawancara dengan Rebecca Chiao (Direktur dan pendiri dari *HarrasMap*), bahkan perempuan yang berjilbab justru menjadi target dari tindak pelecehan seksual di Mesir, karena mereka pada umumnya tidak akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang karena takut akan menjadi aib dan mencoreng nama baik keluarga.

Berkaitan dengan permasalahan aib dan rasa malu bagi keluarga, rezim Mursi juga berkontribusi dalam mengkonstruksi persepsi ini. Kelompok Islamis yang berkoalisi dengan

Ikhwanul Muslimin melarang perempuan untuk memberitahukan pengalaman yang mereka pelecehan seksual dan pemerkosaan yang mereka alami. Mereka bahkan menganggap perempuan yang memberitahukan hal tersebut seperti sosok monster (*ogre*) yang tidak tahu malu, tidak sopan. Seorang ulama Salafi yang bernama Ahmad Abdullah (Syaiikh Abu Islam) menyatakan bahwa perempuan yang seperti itu bagaikan iblis atau *demon*. Beliau bahkan lebih jauh lagi menyatakan bahwa pemerkosaan hukumnya halal (dijijinkan) dan disarankan bagi perempuan yang hadir dalam protes, oleh karena itu mereka tidak seharusnya diberikan simpati (Al arabiya, 2013).

Demikianlah penjelasan bagaimana rezim Mursi yang merupakan rezim pemerintahan hasil revolusi Arab Spring 2011 memperlakukan perempuan di Mesir. Harapan akan semakin terlindunginya hak-hak perempuan pasca Arab Spring menjadi hilang karena tindakan pemerintah yang justru memposisikan diri sebagai penghambat aspirasi dan kebebasan bersuara bagi perempuan Mesir.

Kesimpulan

Upaya perjuangan dan perlawanan yang ditunjukkan perempuan Mesir pada masa Arab Spring, serta diakuinya eksistensi mereka di ranah publik dalam gerakan revolusi tersebut memberikan dampak baru bagi terwujudnya kesetaraan gender di Mesir. Namun realita yang terjadi pasca berhentinya Presiden Mubarak, keberadaan perempuan di tengah-tengah masyarakat semakin diabaikan dari segi politik, hukum dan sosial budaya, tindak diskriminasi dan kekerasan masih dialami oleh perempuan.

Dari tulisan ini bisa disimpulkan ada dua faktor penghambat terwujudnya kesetaraan gender dalam masyarakat Mesir, faktor pertama yaitu keadaan ekonomi Mesir yang masih didominasi oleh sektor-sektor yang berbasis kekuatan fisik yaitu pertambangan, manufaktur dan pertanian. Disamping itu tugas rumah tangga yang mesti dilakukan perempuan menghambat mereka berpartisipasi dalam dunia kerja. Faktor kedua yang menghambat kesetaraan gender di Mesir adalah faktor kebudayaan, yaitu: nilai-nilai patrilokalitas dalam pernikahan serta pandangan bahwa anak laki-laki lebih bisa diandalkan dalam menjamin kehidupan orang tua di masa depan dibanding anak perempuan yang pada akhirnya akan menjadi anggota keluarga dari suaminya. Kedua faktor ini lah yang menjadi penyebab masih gagalnya upaya perempuan Mesir untuk mencapai kesetaraan gender meskipun pengorbanan mereka pada revolusi Arab Spring telah diakui oleh masyarakat Mesir.

Namun disamping kedua faktor umum tersebut, peneliti menemukan bahwa untuk konteks Arab Spring faktor yang paling berpengaruh dalam memburuknya kesetaraan gender di Mesir disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam rezim pemerintahan Mesir. Pasca dipimpin oleh Mursi bersama dengan PKK, posisi perempuan semakin terpuruk terutama di

bidang politik, karena rezim pemerintah berusaha untuk mencegah partisipasi perempuan di politik dan ruang publik.

Hasil yang ditemukan melalui tulisan ini yaitu ketiga faktor yang menghambat kesetaraan gender dalam masyarakat Mesir berasal dari luar perempuan bukanlah faktor internal. Sehingga dalam upaya mewujudkan perubahan tersebut tidak cukup upaya yang dilakukan hanya oleh perempuan Mesir dibutuhkan dukungan dari elit yang berkuasa dan pihak lain untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender di Mesir. Diharapkan pemerintahan Mesir saat ini bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap isu ketimpangan gender di Mesir terutama di bidang politik, karena perempuan Mesir memiliki potensi kekuatan politik yang besar.

Referensi

- Knidiri, Mohamed. (2009) *Women in Arab Societies the case of Morocco*, Cadi Ayyad University Morocco
- Jayachandran, Seema. (2014). *The Roots of Gender Inequality in Developing Countries*, Northwestern University
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, (1994). *Qualitative Data Analysis*, Sage Publications : 1994
- Fidh, (2012), *Women and The Arab Spring: Taking Their Place?*
- Naib, Fatima. 2011, *Women of The Revolution*, Al Jazeera, 19 Februari 2011
- Gallup, (2012), *After the Arab Uprising: women on Rights, Religion and Rebuilding*, Washington DC: Gallup Inc
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Cairo, *Potensi Pasar Bisnis di Mesir*, hal: 2
- Survey of Young People on Egypt Policy Brief Series, *Female Disadvantage in The Egyptian Labor Market: A Youth Perspective*, hal: 3
- The Egyptian Cabinet Information and Decision Support center (IDSC), (2010), *Survey of Young People in Egypt: Preliminary Report, February 2010*
- Kandiyoti, D (1988), *Bargaining with patriarchy*, Gender and Society
- Joseph, S (1993), *Connectivity and patriarchy among urban working-class Arab families in Lebanon*. Ethos.
- Jowkar, F (1986) *Honor and Shame: A Feminist View from within feminist Issue*, 1986
- Khafagy, Fatema. (2013), kata pengantar dalam *Marginalising Egyptian Women: Restriction of women's right under the Muslim Brotherhood*. The Henry Jackson Society, London
- Dyer, Emily. (2013) *Marginalising Egyptian Women: Restriction of Women's Right under Muslim Brotherhood*, The Henry Jackson Society, London

Articles:

- Al Arabiya, *Detained: Egyptian Sheikh who said it is halal to rape female protestor*, <http://www.alarabiya.net/articles/2013/02/17/266857.html> tanggal akses 06 Juni 2017, pukul 21:04
- Cloud in Egypt's Sky: Sexual Harrasment: from Verbal Harrashment to Rape*, (2010), <http://egypt.unfpa.org/english/publication/6eeeb05a-3040-42d2-9e1c-2bd2e1ac8cac> tanggal akses 06 Juni 2017, pukul 20:18
- Eman Hashim, *Women's Voice on the Arab Spring: Eman Hashim*, Vital Voice Blog, 26 Januari(2012), <http://vitalvoices.org/blog/2012/01/women-voice-arab-soring-eman-hashim>
- Isobel Coleman, *Blue bra Girl rallies Egypt's women vs oppression*, CNN, 22 Desember (2011), <http://edition.cnn.com/2011/12/22/opinion/coleman-women-egypt-protest/index.html> , tanggal akses: 7 Juni 2016, pukul: 20:50
- Isobel Coleman, *Women's Voices on The Arab Spring: Isobel Coleman*, Vital Voice Blog, <http://vitalvoices.org/blog/2012/01/women-voices-arab-springs-isobel-coleman> , tanggal akses 7 Juli 2016, pukul 20: 40 pm
- Kareem Fahim, *Harasser of Women in Cairo New face Wrath of Vigilantes*, NewYork Times, 5 November 2012, http://www.nytimes.com/2012/11/06/world/middleeast/egyptian-vigilantes-crack-down-on-abuse-of-women.html?pagewanted=all&_r=0 tanggal akses 7 Juni 2016, pukul: 20:55
- Mona El-naggar, *In Egypt, Women have Burdend but No privileges*, The New York Times 13 Juli(2010), <http://nytimes.com> tanggal akses: 8 Juni 2016, pukul: 12: 41
- Taha R.M, *Shura Council members blame women for harrashment*, Daily News Egypt, 11 Februari (2013), : <http://www.dailynewsegypt.com/2013/02/11/shura-council-members-blame-women-for-harassment/>. Tanggal akses 06 Juni 2017, pukul 20:05
- UN, *Sexual Harrasment in Egypt The Causes and Confrontation in Methods*, <http://www.un.org.eg/Publications.aspx?pageID=43> tanggal akses 07 Juni 2017, pukul 14:45
- Women and the Arab awakening: Now is the time, *The Economist*, 15 Oktober (2011), <http://www.economis.com/node/21532256> tanggal akses 3 Juni 2016, pukul 10:30
- Women and The Arab Spring: Taking Their Place?, FIDH, <http://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/11408-women-and-the-arab-spring-taking-their-place&ved=0ahUKewi> tanggal akses 8 Juni 2016, pukul: 13: 40
- World Economic Forum, *The Global Gender Gap Report (2015)*, World Economic Forum, www.weforum.org tanggal akses 7 Juni 2016, pukul: 22:57
- Yasmina Bekhouche, *Top 5 countries for gender equality in the Middle East*, <https://www.weforum.org/agenda/2013/05/top-5-countries-for-gender-equality-in-the-middle-east>, diakses pada tanggal 29 maret 2016 pukul 8:53
- Zvi Bar'el, *For Egypt's Women, the Arab Springs does not spell freedom*, Haaretz, 18 April (2012), <http://www.haretz.com/newa/features/for-egypt-s-women-the-arab-spring-does-not-spell-freedom-1.424962>